

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga menjadi perhatian yang serius yang tujuannya beririsan dengan tujuan dalam Grand Design Bonus Demografi. Tanpa penanganan yang baik, bonus demografi akan menjadi permasalahan bagi pembangunan daerah, untuk itu perlu penanganan melalui pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang bersinergi dengan OPD, lembaga dan stakeholder terkait.

Kebijakan strategis Tahun 2019 antara lain mengintegrasikan Mata Pelajaran Pendidikan Kependudukan di Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang akan dikuatkan dengan Peraturan Gubernur, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan bekal ilmu kependudukan yang diintegrasikan dalam mata pelajaran di sekolah kepada para siswa agar para siswa dapat memahami permasalahan kependudukan dan merencanakan kehidupannya kedepan terkait pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas penduduk serta pembangunan keluarga yang berkualitas.

Pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mendukung program unggulan Gubernur dalam pengurangan kemiskinan. melalui fasilitasi layanan keluarga berencana dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Penghargaan yang diterima pada tahun 2019 adalah penghargaan Manggala Karya Kencana yang diterima Bapak Gubernur Jawa Tengah. Penghargaan tersebut diberikan kepada Kepala Daerah dalam mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan warga Jawa Tengah.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 2 program, yaitu Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana, dan Program Keluarga Sejahtera yang terdiri dari 7 Indikator Kinerja Program. Perincian ketercapaian dari 7 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana L-I.A.2.8.1-2.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana L-I.A.2.8.1-2 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana memiliki 4 indikator. Tingkat ketercapaiannya adalah sebanyak 3 indikator (75%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi dan 1 indikator (25%) memiliki tingkat ketercapaian sedang; 2) Program Keluarga Sejahtera memiliki 3 indikator. Tingkat ketercapaiannya adalah sebanyak 3 indikator (100%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Secara keseluruhan, 6 indikator (85,71%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi dan 1 indikator (14,19%) memiliki tingkat ketercapaian rendah. Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana	4	3	-	1	-	-
2	Program Keluarga Sejahtera	3	3	-	-	-	-
Jumlah		7	6	-	1	-	-

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana, memiliki 4 indikator dengan tingkat capaian sangat tinggi sebanyak 3, dan sedang sebanyak 1.

Indikator dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah yang aktif dengan realisasi 100% sesuai target; Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dengan realisasi 28,11% melebihi target 28,00%; Unmetneed KB dengan realisasi 13,03% dari target 12,75%.

Sedangkan Indikator dengan tingkat ketercapaian sedang adalah Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian penduduk dengan realisasi 5,56% dari target 8,33%, hal ini disebabkan Draft Peraturan Gubernur tentang Integrasi Pendidikan Kependudukan di Sekolah Menengah Atas di Provinsi Jawa Tengah dikembalikan untuk dibahas kembali sehingga tidak memungkinkan dapat ditetapkan pada tahun 2019;

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota dalam penggunaan MKJP antara lain tertinggi di Kabupaten Temanggung sebesar 48,02%; terendah di kabupaten Kudus sebesar 13,26%. Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/

kota dalam unmetneed KB antara lain terbaik di Kabupaten Banjarnegara sebesar 6,86%; yang kurang baik di kabupaten Brebes sebesar 20,25%.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana yaitu adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong mendewasakan usia perkawinan diatas 20 tahun, membentuk generasi berencana yang berorientasi pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; meningkatkan peserta KB aktif; dan meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB.

Program Keluarga Sejahtera, memiliki 3 indikator kinerja program dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu Persentase ormas/mitra kerja dalam program pembangunan keluarga tingkat daerah yang aktif dengan realisasi 20% sesuai target; Persentase kelompok tribina yang aktif dengan realisasi 96,13%, melebihi target 96,10%; dan Persentase UPPKS yang aktif dengan realisasi 90,57%, melebihi target 89,75%.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota dalam keaktifan kelompok tribina antara lain tertinggi di Kabupaten Pemalang sebesar 104.09%; terendah di kabupaten Temanggung sebesar 75,52%. Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota dalam keaktifan kelompok UPPKS antara lain tertinggi di Kabupaten Wonosobo, Karanganyar, Grobogan, Semarang, Demak, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga sebesar 100%; dan terendah di Kabupaten Temanggung sebesar 50.91%.

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana adalah meningkatkan ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/mitra kerja dalam pembangunan keluarga.

Adapun realisasi sebaran indikator kinerja di 35 kabupaten/kota sebagaimana Lampiran: L-I.E.8.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2019 sejumlah Rp7.288.834.000,00 berupa **Belanja Langsung** yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah untuk membiayai pelaksanaan 2 program dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,35%.

Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana, alokasi anggaran sejumlah Rp6.149.619.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,23%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Peningkatan kesertaan KB MKJP dengan keluaran 1.374.108 orang menjadi peserta KB MKJP; Kegiatan Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan dengan keluaran 70 SLTA mendapat pengetahuan pengendalian penduduk; Kegiatan Pemetaan Pengendalian Penduduk dengan keluaran 2 dokumen informasi kependudukan

dan KB tingkat provinsi; Kegiatan Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB dengan keluaran 866.926 PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tidak berKB; Kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB dengan keluaran 20 organisasi masyarakat/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB.

Program Keluarga Sejahtera, alokasi anggaran sejumlah Rp1.139.215.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,99%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Advokasi Ketahanan Keluarga dengan keluaran 25.897 kelompok Tribina aktif; Kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga dengan keluaran 2 organisasi masyarakat/mitra kerja ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga; Kegiatan Advokasi Kesejahteraan Keluarga dengan keluaran 13.120 kelompok UPPKS aktif.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.A.2.8.1-2.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Terhadap Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada LKPJ Gubernur TA 2018, DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan agar dilakukan perencanaan yang lebih baik lagi supaya target bisa tercapai dimana dari 8 indikator hanya terealisasi 4 indikator. Hal ini ditindaklanjuti dengan meningkatkan kualitas perencanaan utamanya pada sub kegiatan yang mendukung antara lain 1) Dukungan layanan KB bagi akseptor KB MKJP dari keluarga Pra Sejahtera dan KS I; 2) Advokasi peningkatan kesertaan KB MKJP di 4 kab/kota (Pati, Kab. Pekalongan, Banyumas, Kab. Magelang); 3) Pelatihan PPKBD untuk 360 orang sebagai pendukung kinerja PLKB yang jumlahnya terbatas; 4) Penyusunan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk tingkat provinsi dan 2 kab/kota; 5) Advokasi program Sekolah Siaga Kependudukan pada 35 SLTA; 6) Fasilitasi pembentukan Sekolah siaga kependudukan di 3 SLTA; 7) Penggerakan program KB bersama ormas dan mitra kerja; 8) Penganangan Kampung KB di 29 kabupaten; 9) Evaluasi dan penilaian lomba Kampung KB; 10) Advokasi kab/kota unmet need tinggi di 3 kab/kota; 11) Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB; 12) Advokasi peningkatan keaktifan tribina (BKB, BKR, BKL); 13) Advokasi keaktifan dan pengembangan UPPKS; 14) Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kesertaan KB dan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan yang mendukung peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR).

- 2) Tingginya PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, namun tidak ber KB (unmetneed KB) sebanyak 866.926 PUS
- 3) Belum optimalnya keaktifan kelompok Tribina dan UPPKS.

Solusi

- 1) Mendorong optimalisasi peran PLKB (jumlah terbatas), PPKBD dan kader desa dalam peningkatan kesertaan KB utamanya penggunaan KB MKJP.
- 2) Mendorong peningkatan penggerakan dan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat bersama stakeholder terkait serta pengembangan Kampung KB.
- 3) Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas kader pendamping kelompok Tribina dan optimalisasi peran PLKB yang ada.
- 4) Mendorong peningkatan kualitas pengelola kelompok UPPKS dan optimalisasi peran PLKB yang ada untuk meningkatkan keaktifan kelompok UPPKS.